

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2022. *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Yani Dan Gunawan Wijaya. 2002. *Seri Hukum Bisnis. Jaminan Fidusia*. Jakarta: Radja Gralindo Perkasa.
- Anthonius Adhi Soedibyo. 2023. *Hukum Jaminan: Dasar Dasar Mengenai Jaminan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Anton Suyatno. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Buhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Elyta Ras Giting. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herowati Poesoko. 2007. *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma Dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Khoidin. 2005. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- M. Soly Lubis. 2014. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataran University Press.
- Munir Fuady. 1994. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik. Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang Peraturan Pemerintah RI. Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang*

- Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diambil dari eprint ums: etd.eprint.ums.ac.id.
- Retnowulan. Dkk. 1997. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*. Jakarta: BHPN Departemen Kehakiman.
- Ronald Saija. 2025. *Pengantar Hukum Jaminan Dalam Dimensi Pailit*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Rudy Lontoh. 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Edisi 1. Bandung: Alumni.
- S. Mantayborbir. 2004. *Aneka Hukum Perjanjian Sekitar Pengurusan Piutang Negara*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- S. Sastrawidjaja. Man. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sajipto Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Salim HS. 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Santoso. L. 2018. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. TrussMedia Grafika.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sjahdeini. Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini. Sutan Remy. 1996. *Hak Tanggungan Asas-Asas. Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2000. *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahdeini. Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan. Memahami Faillissementsverodening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.

W. Friedman. 2013. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory*. (Terjemahan Muhammad). Bandung: Mandar Maju.

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Jurnal

Afifah, Putri Avi, and Eddie Imanuel Doloksaribu. 2021. "Analisis Yuridis Penggunaan Aset Personal Guarantee Dalam Melunasi Utang Pailit." *Journal Gloria Justitia* 1(2).

Dahliani. Hadi Tuasikal. 2025. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia*. *Journal Of Dual Legal Systems*. Vol. 2. No. 1.

Dewi. N. M. T. 2022. *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. *Jurnal Analisis Hukum*. 5(1).

Eli Diana Mardina. 2022. *Pengaturan Hukum Eksekusi Benda Jaminan Yang Dibeberatkan Hak Tanggungan Dalam Debitor Cidera Janji Dan Dinyatakan Pailit*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)*. Volume 3. Issue 1.

Febriyanto. M. D. & Prawesthi. W. 2024. *Sengketa Hak Milik Tanah Sawah Akibat Kegiatan Jual Beli Yang Tidak Sah*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10(4). 461–473.

Izan Virgina Baginda. 2020. *Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Insolven*. *Lex Privatum* Vol. VIII/No.1.

Jamal. M. et al. 2021. *Analysis of Alternative Dispute Resolution in non-litigation dispute resolution on Islamic Mortgage: at the Ombudsman Institution*. Yogyakarta. Tsaqafah. 17(1). 207–227.

Latifiani. Dian. Alya Fatimah Azzahra. and Oktora Tri Wanida. 2022. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan." 31(1):66–74.

M. Hadi Shubhan. 2020. *Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 2.

Mochamad lailul fadlan. 2023. *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kontrak Bisnis Di Indonesia*. *Maliki Interdisciplinary Journal*. Volume 1. Issue 2. pp. 451-460.

Nurlita Sibli. Ronny A. Maramis. Desy Soeikromo. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit*. *Lex et Societatis*. Volume XI Issue 1.

- Nyulistiowati Suryati. Pupung Faisal. Salsabila Maharani. 2022. *Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan dan UU Hak Tanggungan*. *Legal Spirit*. Volume 6. (2). Desember.
- Pahrudin Azis. Muhammad Kholid. Nasrudin. 2024. *Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi*, Qanuniya: Jurnal ilmu hukum. Vol. 1 No. 2. Juli-Desember
- Priambodo. A. 2021. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. *Iblam Law Review*. 1(3). 4.
- Ronald Saija. 2024. *Problematisasi Implekasi Eksekusi Harta Pailit oleh Kreditor Separatis dan Kurator Perspektif Keadilan*. *KANJOLI Business Law Review*. Volume 2 Nomor 1 Juni.
- Roni Kurniawan. 2025. *Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan*. *Jurnal Kliendi Law*. Volume 2. Nomor 1.
- Safira Maharani Putri. Muhammad Rizal Rustam. 2015. *Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta milik pihak ketiga Dalam Kepailitan Yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator*. *Jembatan Hukum*. Volume 2 Nomor 1.
- Sinta Nur Hamidah. Mahendra Wardhana. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Aset Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Boedel Pailit*.
- Situmorang. M. 2022 *Measuring the effectiveness of Consumer Dispute Resolution on Small Value E-Commerce Transaction*. *Jurnal Penulisan hukum De Jure*. 22(4). 537.
- Sri Redjeki Slamet. 2016. *Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*. *Forum Ilmiah*. Volume 13 Nomor 1 Januari.
- Sulaiman Syamsuddin. Ma'aruf Hafidz. Hamza Baharuddin. 2021. *Perlindungan Hukum pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit*. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Volume 2. Nomor 3. Maret.
- Syamsudin. S. Hafidz. M. & Baharuddin H. 2021. *Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan dalam harta pailit*. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. 2(3).1368–1379.
- Violenza Alif. Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum. 2025. *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.12.

Skripsi

- Agung Syaputra. 2022. *Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Arina Salsabila Munajat. 2023. *Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo No. 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
- Niken Pratiwi Supratno. 2023. *Tanah dan Bangunan Milik Pihak Lain Sebagai Jaminan Hak Tanggungan yang Termasuk Dalam Boedel Pailit (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 689k/Pdt.Sus/2012)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Tiara Permatasari. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Mengamankan Boedel Pailit Benda Bergerak Selama Masa Pemberesan Harta Pailit*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sumber internet

- Aida Mardatillah. 2024. *Menyoal Personal Guarantee sebagai pihak perusahaan pailit*. *Hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt664d94d7db123/menyoal-personal-guarantee-sebagai-pihak-ketiga-ketika-perusahaan-pailit/>. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2026.
- Angga Brepin Sinulingga. 2025. *Keuntungan Memilih Arbitrase Daripada Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa*. *Hukumonline.com*.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-memilih-arbitrase-daripada-pengadilan-dalam-penyelesaian-sengketa-lt57bd288d05160/#_ftn2. Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2026.
- Alfi Renata, *Akta Perjanjian Kredit sebagai Grosse Akta*. *Hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ci4015/akta-perjanjian-kredit-sebagai-grosse-akta>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2025.
- Alfi Renata. 2010. *Akta Perjanjian Kredit sebagai Grosse Akta*. *Hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ci4015/akta-perjanjian-kredit-sebagai-grosse-akta>. Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2025.
- Dedi F. Prasetya. 2023. *Kelebihan PKPU Dan Kepailitan*. Scribd.
https://id.scribd.com/document/632405648/Kelebihan-PKPU-dan-Kepailitan-ENPals?utm_source=chatgpt.com. Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2025.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 23 agustus 2025

Letezia Tobing. *Perbedaan Personal Guarantee dan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan. Hukumonline.com.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-personal-guarantee-dan-pihak-ketiga-pemberi-jaminan-lt5434111e798f2/>. Diakses pada tanggal 2 januari 2026.

LBH Pengayoman. 2023. *Wanprestasi Pemberi Hak Tanggungan, Bagaimana Eksekusinya?* <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/wanprestasi-pemberi-hak-tanggungan-bagaimana-eksekusinya/>. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2025.

Tim Hukumonline. 2024. *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=1>. Diakses Pada Tanggal 27 September 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. 1874. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgeliejke Wetbook)*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1960. *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1984. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210K/Pdt/1984*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1996. *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Putusan Mahkamah Agung nomor 614K/Pdt.Sus/2011*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2019. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 879K/Pdt.Sus-Pailit/2019*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2023. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*. Sekretariat Indonesia. Jakarta.